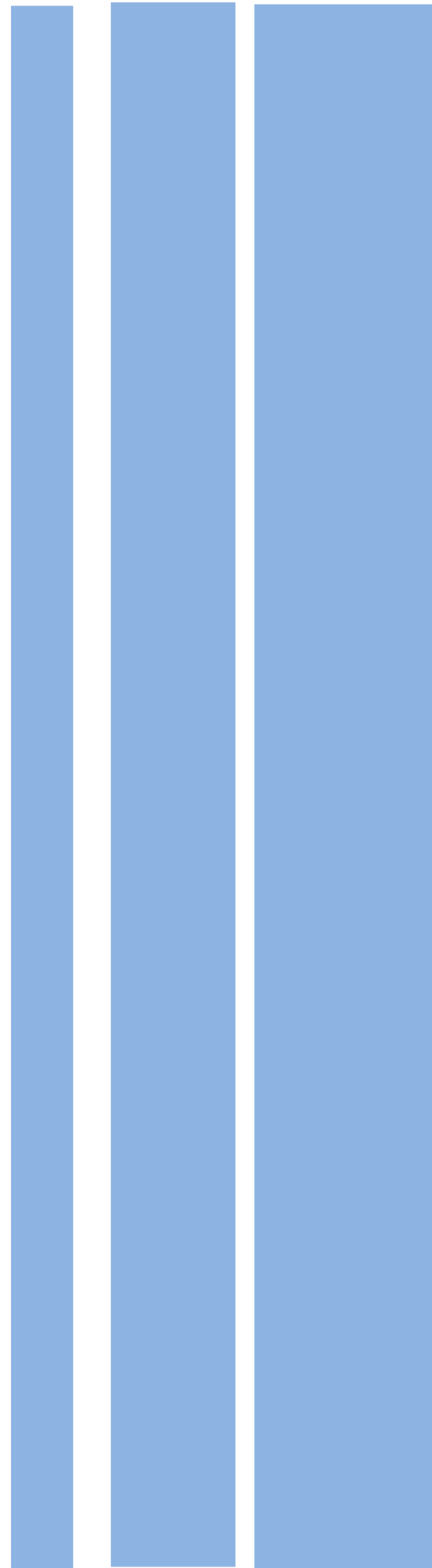


PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2023



Jl Penjajap
Sambas, Kalimantan Barat 79453

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pemangkat, Januari 2024
Kepala,



Anam Tofani, S.Pi, S.Mi.
NIP. 19760722 200212 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	iv
Laporan Realisasi Anggaran	1
Neraca	2
Laporan Operasional	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5
Penjelasan Umum	5
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	11
Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	17
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	31
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	36
Pengungkapan Penting Lainnya	39
Lampiran dan Daftar	x

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemangkat, Januari 2024
Kepala,



Anam Tofani, S.Pt., M.St.
NIP 19760722 200212 1 003

Laporan Keuangan Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Semester II Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahunan TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.133.457.681; atau mencapai 103 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.101.045.000;

Realisasi Belanja Negara pada Tahunan TA 2023 adalah sebesar Rp12.311.736.170; atau mencapai 99,12 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp12.426.857.000;

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp33.825.879.721; yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp14.746.345; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp29.736.062.681; Properti Investasi sebesar Rp4.054.034.250; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp21.036.445; Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp30.362.052; dan Rp33.795.517.669;

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.115.621.484; sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp13.483.333.521; sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp12.367.712.037;) Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar (Rp338.047.993;) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp12.705.760.030;)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp35.322.999.210; ditambah Defisit-LO sebesar (Rp6.207.297.728;) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai (Rp0;) dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp4.922.319.908; sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp34.038.021.390;.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun Anggaran 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**KANTOR PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022***(Dalam Rupiah)*

Uraian	Cat	Th. 2023				Th. 2022
		Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (di Bawah)	%	Realisasi
Pendapatan Negara Dan Hibah	B.1					
Pendapatan Negara Bukan Pajak	B.1	1.101.045.000	1.133.457.681	(626.541.901)	43	472.627.143
Jumlah Pendapatan dan Hibah		1.101.045.000	474.503.099	(626.541.901)	43	472.627.143
Belanja	B.2					
Belanja Pegawai	B.3	4.747.704.000	4.736.498.502	(11.205.498)	100	4.390.457.226
Belanja Barang	B.4	6.522.073.000	6.419.596.400	(102.476.600)	98	4.054.918.100
Belanja Modal	B.5	1.157.080.000	1.155.641.268	(1.438.732)	100	653.818.600
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-			
Jumlah Belanja		12.426.857.000	12.311.736.170	(115.120.830)	99	9.099.193.926

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA**KANTOR PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022***(Dalam Rupiah)*

Uraian	Catatan	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3		
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	-	
Beban Dibayar di Muka	C.1.8		
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.9	13.343.345	15.182.305
Persediaan	C.1.10	1.403.000	3.680.000
JUMLAH ASET LANCAR		14.746.345	18.862.305
ASET TETAP			
	C.2		
Tanah	C.2.1	3.102.080.000	6.075.008.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	9.378.421.378	17.581.044.395
Gedung dan Bangunan	C.2.3	8.901.810.154	9.890.987.500
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	27.652.985.287	27.241.108.173
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	515.000.000	515.000.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	50.000.000	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	- 19.864.234.138	- 26.488.576.281
JUMLAH ASET TETAP		29.736.062.681	34.814.571.787
Properti Investasi			
	C.3		
Properti Investasi	C.3.1	4.512.070.000	
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.3.3	- 458.035.750	
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		4.054.034.250	
ASET LAINNYA			
	C.4.2		
Aset Lain- lain	C.4.2	8.967.352.006	1.060.629.489
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3	- 8.946.315.561	- 546.524.838
JUMLAH ASET LAINNYA		21.036.445	514.104.651
JUMLAH ASET		33.825.879.721	35.347.538.743
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
	C.5		
Uang Muka dari KPPN	C.5.1	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.2	30.362.052	20.486.464
Pendapatan Diterima di Muka	C.5.3	-	4.053.069
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.5.5	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		30.362.052	24.539.533
JUMLAH KEWAJIBAN		30.362.052	24.539.533
EKUITAS			
	C.7		
Ekuitas	C.7	33.795.517.669	35.322.999.210
JUMLAH EKUITAS		33.795.517.669	35.322.999.210
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		33.825.879.721	35.347.538.743

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL
KANTOR PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.115.621.484	962.364.095
JUMLAH PENDAPATAN		1.115.621.484	962.364.095
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	4.743.095.502	4.390.457.226
Beban Persediaan	D.3	56.346.200	42.866.000
Beban Barang dan Jasa	D.4	3.128.593.388	2.373.534.414
Beban Pemeliharaan	D.5	1.138.559.900	551.365.350
Beban Perjalanan Dinas	D.6	2.101.652.500	1.090.022.700
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	2.315.086.031	2.279.252.105
JUMLAH BEBAN		13.483.333.521	10.727.497.795
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		- 12.367.712.037	- 9.765.133.700
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		- 481.398.299	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		6.700.000	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		488.098.299	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		143.350.306	19.665.350
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11	- 338.047.993	19.665.350
SURPLUS /DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		- 12.705.760.030	- 9.745.468.350
POS LUAR BIASA	D.12	-	-
Beban Luar Biasa			
JUMLAH POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		- 12.705.760.030	- 9.745.468.350

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KANTOR PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	35.322.999.210	36.836.578.282
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	- 12.705.760.030	- 9.745.468.350
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3		
KOREKSI YANG MENABAHKAN/MENGURANGI EKUITAS	E.4		- 137.126.918
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2		
SELISIH REVALUASI ASET	E.4.3		
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4.4		- 137.126.918
LAIN - LAIN	E.4.5		
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	11.178.278.489	8.369.016.196
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		- 1.527.481.541	- 1.513.579.072
EKUITAS AKHIR	E.6	33.795.517.669	35.322.999.210

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis*

Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat terus meningkatkan kinerjanya dalam rangka mendukung Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu "**Pembangunan Kelautan dan Perikanan Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.**" Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:
Sumberdaya ikan dalam pemanfaatannya apabila dikelola secara tidak profesional maka akan semakin berkurang dan bahkan akan habis dengan sendirinya. Sejalan dengan hal tersebut Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat terus meningkatkan kinerja dalam menjalankan perannya memberikan pelayanan kepada masyarakat nelayan dalam peningkatan produksi hasil perikanan sampai kepada pendistribusian hasil tangkapannya. Sehubungan dengan hal tersebut visi, misi, tujuan dan sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010 – 2024 yang telah ditetapkan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3 Basis Akuntansi

Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pererintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar
Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan
Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut:

Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.

Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ,

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,

Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan

harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
Tanah;

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,

Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar

harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penjelasan atas Pos Laporan Realisasi Anggaran

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12.788.606.000. Selama tahun 2023, dilakukan revisi atas DIPA Awal Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang disebabkan adanya *Automatic Adjustment*, penghematan belanja pemerintah serta realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA

Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023	
	Anggaran Awal	Anggaran setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PBNP	1.101.045.000	1.101.045.000
Jumlah Pendapatan	1.101.045.000	1.101.045.000
Belanja		
Belanja Pegawai	4.651.633.000	4.747.704.000
Belanja Barang	6.979.893.000	6.522.073.000
Belanja Modal	1.157.080.000	1.157.080.000
Belanja Bantuan Sosial		
Jumlah Belanja	12.788.606.000	12.426.857.000

Realisasi Belanja Rp12.311.736.170;

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Tahunan TA 2023 adalah sebesar Rp12.311.736.170; atau 99,12% dari anggaran belanja sebesar Rp12.426.857.000; Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahunan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan TA 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	4.747.704.000	4.736.498.502	100
Belanja Barang	6.522.073.000	6.419.596.400	98
Belanja Modal	1.157.080.000	1.155.641.268	100
Belanja Bantuan Sosial			
Total Belanja Kotor	12.426.857.000	12.311.736.170	99,12
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	
Jumlah	12.426.857.000	12.311.736.170	99,12

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami kenaikan 1 persen dari periode yang berakhir 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan antara lain:

Adanya kenaikan pembayaran kekurangan gaji pokok, tunjangan kinerja untuk pegawai Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat.

Kegiatan belanja modal lebih awal dilaksanakan.

Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Pegawai	2.317.429.407	1.896.873.854	1,22171
Belanja Barang	2.289.383.600	1.701.067.800	1,345851
Belanja Modal	790.010.000	416.258.600	1,897883
Belanja Bantuan Sosial			
Jumlah	5.396.823.007	4.014.200.254	1

*Belanja Pegawai
Rp2.317.429.407;*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.317.429.407; dan Rp1.896.873.854; Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,22 persen dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

Adanya penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam rangka mendukung program dan kegiatan kantor.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.238.632.019	989.933.201	1,251228
Belanja Uang Makan ASN	114.727.000	109.711.000	1,04572
Belanja Lembur	-	-	0
Jumlah Kotor	1.353.359.019	1.099.644.201	1,230724
Pengembalian BP	2.725.350	-	
Jumlah	1.350.633.669	1.099.644.201	1,228246

*Belanja Barang
Rp2.289.383.600;*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.289.383.600; dan Rp1.701.067.800; Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan 1,35 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini disebabkan, antara lain:

Peningkatan Belanja Perjalanan Dinas seiring dengan

meningkatnya kegiatan yang dilakukan diluar kantor dan undangan kegiatan.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Barang Operasional	1.238.632.019	989.933.201	1,251
Belanja Barang Operasional Lainnya	147.878.000	79.116.000	1,869
Belanja Persediaan	32.526.400	25.130.000	1,294
Belanja Jasa	406.698.700	130.777.300	3,11
Belanja Pemeliharaan	428.814.700	360.568.750	1,189
Belanja Perjalanan Dinas	387.531.400	288.585.200	1,343
Jumlah Kotor	2.642.081.219	1.874.110.451	1,41
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah	2.642.081.219	1.874.110.451	1,41

Belanja Modal
Rp790.010.000;

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp790.010.000; dan Rp416.258.600; Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar (1,9) persen dibandingkan TA 2022 disebabkan ada nya kegiatan yang menambah nilai gedung dan bangunan, dan juga penambah nilai jalan dan jembatan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Modal Tanah	-	-	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.400.000	141.651.000	1,408
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	60.000.000		
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	365.000.000	72.070.000	5,065
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		150.000.000	
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	15.000.000		
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	150.610.000	52.537.600	2,867
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	
Belanja Modal lainnya	-	-	0
Jumlah Belanja Kotor	790.010.000	416.258.600	1,898
Pengembalian Belanja Modal			0
Jumlah Belanja Modal	790.010.000	416.258.600	1,898

Belanja Modal Tanah
Rp0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2023 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar 0 persen dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan tidak adanya pengadaan lahan yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan Gedung pelayanan dan area untuk aktivitas perkantoran.

Perbandingan Realisasi Belanja Tanah
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp199.400.000;

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp199.400.000; mengalami kenaikan sebesar 1,41 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp141.651.000; Hal ini disebabkan oleh adanya pembelian peralatan dan mesin dan adanya hibah dari kantor pusat. Adapun penambahan tersebut adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realiasi Belanja Peralatan dan Mesin
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Laptop	125.000.000	0	0
Tablet PC	39.960.000	0	0
Printer	13.440.000	8.000.000	1,68
Scanner	21.000.000	7.000.000	3,00
Trolley Car/Lori	0	15.000.000	0
CCTV	0	6.650.000	0
Meja Kerja Kayu	0	5.000.000	0
A.C. Split	0	4.001.000	0
Televisi	0	14.000.000	0
Sound System	0	8.000.000	0
Dispenser	0	3.000.000	0
Tripod Camera	0	14.000.000	0
Drone	0	17.000.000	0
Conveyor	0	10.000.000	0
Komputer Unit Lainnya	0	30.000.000	0
Pagar Jalan dan Taman	0	150.000.000	0
Jumlah Belanja Kotor	199.400.000	291,651.000	(0,69)
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	199.400.000	291.651.000	(0,69)

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp375.000.000

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp375.000.000 dan Rp72.070.000. Realisasi Belanja Modal TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 5,20 persen dibandingkan Realisasi TA 2022. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari bangunan terbuka lainnya dan pagar permanen.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Gedung Kantor Lainnya	0	72.070.000	0
Bangunan Terbuka Lainnya	200.000.000	0	0
Pagar Permanen	175.000.000	0	0
Jumlah Belanja Kotor	375.000.000	72.070.000	5,20
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	1.750.000.000	1.050.000.000	66,67

Belanja Modal Jalan,
Irigasi dan Jaringan
Rp165.610.000

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp165.610.000 dan Rp52.537.600. Realisasi Belanja Modal TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 3,15 persen dibandingkan Realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan adanya peningkatan jalan khusus kompleks untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Jalan Khusus Kompleks	165.610.000	0	0
Dermaga	0	52.537.600	0
Jumlah Belanja Kotor	165.610.000	52.537.600	3,15
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	165.610.000	52.537.600	3,15

Belanja Modal
Lainnya Rp0

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 tidak mengalami

kenaikan/penurunan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan tidak adanya pengadaan *software* untuk mendukung pekerjaan perkantoran sehari-hari.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Software	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada TA 2023 tidak mengalami kenaikan / penurunan sebesar 0% dibandingkan TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam bentuk uang	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

Aset Lancar Rp110.526.240

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp110.526.240 dan Rp18.862.305.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp90.000.000

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp90.000.000 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 01
Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Uang Tunai	0	0
Rekening Bank	90.000.000	0
Jumlah	90.000.000	0

Uang masih berbentuk SPM dan sudah diajukan ke KPPN Singkawang pada tanggal 27 Juni 2023, dikarenakan tanggal 28 sampai 30 Juni 2023 merupakan Cuti Bersama jadi SP2D terbit tanggal 3 Juli dan uang masuk ke rekening bendahara. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada masing-masing Satker disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0, yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel 02
Perbandingan Kas di Bendahara Penerimaan TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Uang Tunai	0	0
Rekening Bank	0	0
Jumlah	0	0

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp0*

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 03
Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Bukan Pajak Rp378.840

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp378.840 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 04

Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Piutang PNPB	0	0
Piutang Lainnya	378.840	0
Jumlah	378.840	0

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp0

C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 05

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.			-
2.			
3.			
4.			
5.			-
6.		-	
	Jumlah	0	0

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker disajikan sebagai berikut:

Tabel 06
Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
	Jumlah	0	0

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih – Piutang
Jk. Pendek Rp0

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 07
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Pendek
(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Bagian Lancar TPA			
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0		0

Beban Dibayar di
Muka
Rp0

C.1.8. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Beban Dibayar di Muka Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 08
Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pembayaran Internet	0	0
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	0	0
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	0	0
Jumlah	0	0

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp15.182.305 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 09
Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	0	15.182.305
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	0
Jumlah	0	15.182.305

Persediaan Rp20.147.400

C.1.10. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp20.147.400 dan Rp3.680.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10
Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2023	Tahun 2022
Barang Konsumsi	20.147.400	3.680.000
Barang untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0
Persediaan Lainnya	0	0
Jumlah	20.147.400	3.680.000

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Tidak terdapat barang konsumsi senilai 0 berada dalam kondisi rusak dan tidak disajikan dalam Persediaan. Rincian Persediaan masing-masing Satker disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Aset Tetap
Rp34.421.621.309

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp34.421.621.309 dan Rp34.814.571.787.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah
Rp6.075.008.000

C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp6.075.008.000 dan Rp6.075.008.000

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Rincian Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 30 Juni 2022		6.075.008.000
Mutasi tambah:		
Pembelian		0
Hibah		0
Reklasifikasi Masuk		-
Mutasi Kurang:		
Revaluasi Aset		0
Penghapusan		-
Saldo Per 31 Desember 2022		6.075.008.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023		-
Nilai Buku Per 30 Juni 2023		6.075.008.000

Mutasi tambah:

Tidak ada mutasi tambah

Mutasi kurang:

Tidak ada mutasi kurang

Peralatan dan
Mesin
Rp17.780.444.395

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp17.780.444.395 dan Rp17.581.044.395.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 12
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 30 Juni 2022		17.581.044.395
Mutasi tambah:		
Pembelian		199.400.000
Hibah		0
Transfer Masuk		0
Reklasifikasi Masuk		0
Koreksi Tambah		0
Mutasi Kurang:		
Penghentian aset dari penggunaan		0

Penghapusan	0
Saldo Per 30 Juni 2023	17.780.444.395
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	(16.917.289.084)
Nilai Buku Per 30 Juni 2023	863.155.311

Mutasi tambah:

Pembelian berupa:

Tabel 13
Pembelian Peralatan dan Mesin TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Peralatan dan Mesin	Nilai
1.	Laptop	125.000.000
2.	Tablet PC	39.960.000
3.	Printer	13.440.000
4.	Scanner	21.000.000
	Jumlah	199.400.000

Tidak ada Hibah

Tidak ada Reklasifikasi Masuk

Tidak ada Koreksi Tambah

Mutasi kurang:

Tidak ada Penghentian

Tidak ada Penghapusan

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya per 30 Juni 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Gedung dan
Bangunan
Rp10.265.987.500

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp10.265.987.500 dan Rp9.890.987.500.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2023

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 30 Juni 2022	9.890.987.500
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung dan Pagar	375.000.000
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	0
Saldo Per 30 Juni 2023	10.265.987.500
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	(1.776.807.931)
Nilai Buku Per 30 Juni 2023	8.489.179.569

Mutasi tambah:

Pembangunan Bangunan terbuka sebesar Rp200.000.000.

Pembangunan Pagar Permanen sebesar Rp175.000.000.

Mutasi kurang:

Tidak ada Koreksi kurang.

Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 30 Juni 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp27.406.718.173

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp27.406.718.173 dan Rp27.241.108.173 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15

Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 30 Juni 2022		27.241.108.173
Mutasi tambah:		
Pengembangan Jalan Kompleks		165.610.000
Mutasi Kurang:		
Koreksi Pencatatan		-
Saldo Per 30 Juni 2023		27.406.718.173
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023		(8.977.439.744)
Nilai Buku Per 30 Juni 2023		18.429.278.429

Mutasi tambah:

Berupa Pengembangan jalan kompleks dalam rangka memperbaiki jalan yang rusak.

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan beserta Akumulasi Penyusutannya per 30 Juni 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Aset Tetap Lainnya
Rp515.000.000

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp515.000.000 dan Rp515.000.000 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel 16

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 30 Juni 2022		515.000.000
Mutasi tambah:		
Pembelian		0
Mutasi Kurang:		
Koreksi Pencatatan		-
Saldo Per 30 Juni 2023		515.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022		(0)
Nilai Buku Per 30 Juni 2023		515.000.000

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp50.000.000

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp50.000.000 dan Rp0 yang merupakan perencanaan Pembangunan rumah dinas yang belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Rincian KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	No. Kontrak	Nilai Kontrak	%	KDP	Ket
1.	T.28/PPN.PMK/ PL.430/I/2023	75.000.000	75	50.000.000	
2.					
	Jumlah	75.000.000		50.000.000	

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp27.671.536.759

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp27.671.536.759 dan Rp26.488.576.281.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023.

Tabel 18

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	17.780.444.395	16.917.289.084	863.155.311
2.	Gedung dan Bangunan	10.265.987.500	1.776.807.931	8.489.179.569
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	27.406.718.173	8.977.439.744	18.429.278.429
4.	Aset Tetap Lainnya	515.000.000	0	515.000.000
	Jumlah	55.968.150.068	27.671.536.759	28.296.613.309

Piutang Jangka Panjang
Rp00

C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Tidak ada Piutang Jangka Panjang pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat merupakan Piutang TP/TGR dan Piutang TPA.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Rp0

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing Satker adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Rincian Piutang Tagihan TP/TGR TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.			-
2.			
3.			
4.			
5.			
6.		-	
	Jumlah	0	0

*Tagihan
Penjualan
Angsuran Rp0*

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0, berupa penjualan aset tetap yang pembayarannya diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian TPA per Satker Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Rincian Piutang TPA TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
	Jumlah	0	0

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih – Piutang
Jangka Panjang
Rp0*

C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut.

Tabel 21
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk.Panjang
TA 2023

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Tagihan TPA			
Lancar		0,5%	0
Kurang Lancar		10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0		0

Aset Lainnya
Rp21.960.218

C.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp21.960.218 dan Rp514.104.651.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat terdiri dari Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud
Rp0

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Tabel 24

Rincian Aset Tak Berwujud TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.		0
2.		0
	Jumlah	0

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Adapun mutasi Aset Tak Berwujud pada Kantor Wilayah Akuntansi Jawa Barat adalah sebagai berikut.

Tabel 25

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 30 Juni 2022	0
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Saldo Per 30 Juni 2023	0
Amortisasi s.d. 30 Juni 2023	(0)
Nilai Buku Per 30 Juni 2023	0

Mutasi tambah:
Tidak ada mutasi tambah.

Aset Lain-Lain
Rp490.929.489

C.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah Rp490.929.489 dan Rp1.060.629.489. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan Pelaporan Keuangan serta dalam proses penghapusan dari BMN, dan kas BLU yang dibatasi penggunaannya.

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 26
Rincian Mutasi Aset Lain-lain

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 30 Juni 2022		1.060.629.489
Mutasi tambah:		
Reklasifikasi dari Aset Tetap		0
Mutasi Kurang:		
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan		(0)
Penghapusan BMN		(569.700.000)
Saldo Per 30 Juni 2023		490.929.489
Amortisasi s.d. 30 Juni 2023		(468.969.271)
Nilai Buku Per 30 Juni 2023		21.960.218

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tidak ada mutasi tambah.

Mutasi kurang dari penghapusan rumah dinas.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp468.969.218

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp468.969.218 dan Rp546.524.838. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 27

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset
Lainnya TA 2022

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
1.				
2.				
	Jumlah	0	0	0
B.	Aset Lain-lain	490.929.489	468.969.271	21.960.218
	Jumlah	490.929.489	468.969.271	21.960.218
	Total	490.929.489	468.969.271	21.960.218

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kewajiban
Jangka Pendek
Rp516.086.377

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp516.086.377 dan Rp24.539.533.

Utang Muka dari
KPPN
Rp90.000.000

C.5.1. Utang Muka dari KPPN

Utang Muka dari KPPN per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp90.000.000 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Utang Muka dari KPPN untuk masing-masing Satker lingkup Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat adalah sebagai berikut:

Tabel 28
Rincian Utang Muka dari KPPN TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023
1.	Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	90.000.000
2.		
3.		
	Jumlah	90.000.000

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp402.772.208

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp402.772.208 dan Rp20.486.464. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 29
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	145.491.108
2.	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	257.281.100
3.		
	Total	402.772.208

Pendapatan
Diterima di Muka
Rp4.053.069

C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp4.053.069 dan Rp4.053.069.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN.

Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Tabel 30
Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2023
(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah	Keterangan
Pengguna Jasa	4.053.069	Jasa Langganan Listrik
Jumlah	4.053.069	

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0

C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 31
Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	0
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	0
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	0
Jumlah	0	0

Ekuitas
Rp34.038.021.390

C.7 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing- masing sebesar Rp34.038.021.390 dan Rp35.322.999.210. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
PNBP
Rp439.649.328

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp439.649.328 dan Rp461.000.430. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	2.651.880	4.204.200	(0,63)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	43.243.652	38.750.135	1,12
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	393.753.796	418.046.095	(0,94)
Jumlah	439.649.328	461.000.430	0,95

Pendapatan akrual pada Satker Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berasal dari Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan, Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan Tusi dan Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp2.462.920.515

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.462.920.515 dan Rp2.272.339.538. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Gaji	1.496.124.777	1.394.205.725	1,13
Beban Tunjangan-tunjangan	966.795.738	878.133.813	1,11
Beban Honorarium dan Vakasi	0	0	0
Beban Lembur	0	0	0
Jumlah Beban	2.462.920.515	2.272.339.538	8,39

Beban
Persediaan
Rp18.670.000

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp18.670.000 dan Rp22.053.500. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Persediaan Konsumsi	18.670.000	22.053.500	(15,34)
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0
Jumlah Beban	18.670.000	22.053.500	(15,34)

Beban Barang
dan Jasa
Rp1.582.788.036

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.582.788.036 dan Rp1.105.083.850. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Secara keseluruhan terjadi Kenaikan Beban Barang dan Jasa, hal ini disebabkan peningkatan beberapa pos beban seperti beban langganan listrik, beban jasa profesi, beban honor dan beban bahan seiring dengan meningkatnya aktivitas pelayanan dan diklat. Walaupun secara total beban barang dan jasa mengalami kenaikan tetapi pada beberapa pos beban terjadi penurunan karena penghematan atas beban-beban operasional perkantoran, penurunan pengiriman surat karena sudah disampaikan secara *online*. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Keperluan Perkantoran	684.644.100	699.488.050	(0,98)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	28.816.000	49.488.000	(0,58)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos	220.000	394.000	(0,56)
Beban Honor Operasional Satker	79.300.000	47.362.000	16,74
Beban Barang	147.878.000	79.116.000	18,7

Operasional Lainnya			
Beban Barang Operasional- Penanganan Pandemi COVID-19	0	115.000	0
Beban Bahan	149.270.800	84.243.500	17,72
Beban Honor Output Kegiatan	22.850.000	8.700.000	26,26
Beban Langganan Listrik	88.486.317	110.540.600	(80,05)
Beban Langganan Telepon	476.469	539.100	(21,05)
Beban Langganan Air	308.800	0	0
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	15.973.550	18.952.600	(84,28)
Beban Sewa	0	0	0
Beban Jasa Profesi	4.200.000	5.400.000	(77,77)
Beban Jasa Lainnya	360.364.000	295.000	122,16
Beban Jasa – Penanganan Pandemi COVID -19	0	450.000	0
Jumlah Beban	1.582.788.036	1.105.083.850	43,23

Beban
Pemeliharaan
Rp436.775.700

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp436.775.700 dan Rp360.568.750. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	216.950.000	88.000.000	46,534
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	114.733.000	88.734.750	29,29
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	80.000.000	175.500.000	(45,58)
Beban Pemeliharaan Jaringan	25.092.700	8.334.000	3,01
Jumlah Beban	436.775.700	360.568.750	21,14

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp490.738,200

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp490.738.200 dan Rp288.585.200. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh meningkatnya frekuensi perjalanan dinas pegawai untuk menghadiri kegiatan rapat koordinasi atau pelatihan yang diselenggarakan Kantor Pusat dimana perjalanan dinasnya ditanggung sendiri oleh masing-masing satuan kerja. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	421.930.800	161.388.900	261,44
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	43.250.000	31.000.000	39,52
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.500.000	13.735.000	(32,76)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	21.057.400	82.461.300	(25,54)
Jumlah Beban	490.738.200	288.585.200	70,05

Beban Barang
untuk Diserahkan
Kepada
Masyarakat Rp0

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Satker tidak memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat dan pengusaha UMKM. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0
Jumlah Beban	0	0	0

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Peningkatan beban bansos yang diberikan kepada kelompok masyarakat sebagai Bantuan Sosial untuk mendukung program Indonesia Pintar. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial – dalam bentuk Uang	0	0	0
Jumlah Beban	0	0	0

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp1.187.006.612

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.187.006.612 dan Rp1.138.559.010. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	274.068.370	269.674.629	1,02
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	123.354.444	123.966.790	(1,00)
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	654.916.639	606.411.870	1,08
Beban Penyusutan Jaringan	130.621.025	131.605.195	(1,00)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	4.046.134	6.900.526	(0,59)
Jumlah Penyusutan	1.187.006.612	1.138.559.010	4,25
Beban Amortisasi Aset Lainnya	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0
Jumlah Beban	1.187.006.612	1.138.559.010	4,25

*Beban
Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih Rp0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidak tertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Non Lancar	0	0	0
Jumlah Beban	0	0	0

*Kegiatan Non
Operasional Rp0*

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0
Selisih Kurs	0	-	0
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0
Jumlah Beban	0	0	0

*Pos Luar Biasa
Nihil*

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2023 dan 2022.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp35.322.999.210*

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp35.322.999.210 dan Rp36.836.578.282.

*Defisit LO
Rp6.207.297.728*

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah defisit sebesar Rp6.207.297.728 dan Rp4.722.904.418. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

*Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi
Rp0
Penyesuaian Nilai Aset Rp0*

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0.

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 32

Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2023

No.	Jenis Persediaan	Koreksi
1.	Barang Konsumsi	0
2.	Suku Cadang	0
3.	Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	0
4.	Barang Persediaan Lainnya	0
Jumlah		0

Selisih Revaluasi Aset Rp0

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
Rp0*

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing

adalah sebesar Rp0 dan Rp3.350.458.
Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 33
Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2023

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
Jumlah	0

Koreksi Lain-lain
Rp0

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Rincian Koreksi Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Rincian Koreksi Lain-lain TA 2023

Jenis Koreksi	Jumlah
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi Hibah	0
Jumlah	0

Transaksi Antar
Entitas
Rp4.922.319.908

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp4.922.319.908 dan Rp3.541.573.111.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 35
Transaksi Antar Entitas TA 2023

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	474.503.099
Ditagihkan ke Entitas Lain	(5.396.823.007)
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	(4.922.319.908)

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan

dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2023, DDEL sebesar Rp474.503.099 sedangkan DKEL sebesar Rp5.396.823.007.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp0 terdiri dari:

Tabel 36
Transfer Masuk TA 2023

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin		0
2.	Persediaan		0
Jumlah			0

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp0.

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp0 dari total Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2023.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 37
Pengesahan Hibah Langsung TA 2023

No.	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan Hibah
1.			0
2.			0
Total Pengesahan			0
Pengesahan Pengembalian Hibah			-
Jumlah			0

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Per Satker Tahun 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Ekuitas Akhir
Rp34.038.021.390

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp34.038.021.390 dan Rp35.651.896.517.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian – kejadian penting setelah tanggal neraca pelaporan.

F.1 Pengungkapan Lain-lain

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor: KEP.34/MEN-KP/KU.611/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor: KEP.79/MEN/KU.611/2019 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Akuntansi Bogor pada tanggal 08 Juni 2022 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan,

Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Sarwono, A.Pi
Pejabat Pembuat Komitmen	: Dwi Ari Priyanto, ST., M.Si
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Junita E Damanik, SE
Bendahara	: Turbina

Menjadi:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Anam Tofani, S. Pi., M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen	: Dwi Ari Priyanto, ST., M.Si
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Junita E Damanik, SE
Bendahara	: Turbina

Pada Tahun Anggaran 2015 berdasarkan pemeriksaan fisik (pengukuran) lapangan antara Tim BPK bersama PPK PPN Pemangkat dan Kontraktor pelaksana CV. Citra Hotama terdapat selisih volume antara di kontrak dengan hasil pengukuran yang meliputi berkas terlampir. Dengan adanya kekurangan volume tersebut Pihak Tim BPK memberikan saran kepada pihak Kontraktor pelaksana CV. Citra Hotama agar menyelesaikan kekurangan pekerjaan pengaspalan tersebut jika ruas jalan tersebut telah bersih dari tumpukan material dari pekerjaan turap beton tersebut. Dengan adanya saran tersebut pihak CV. Citra Hotama menyanggupi untuk menyelesaikan sisa pekerjaan kurang sesuai dengan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan pengaspalan tanggal 11Maret 2016 (surat terlampir). Akibat dari keterlambatan pekerjaan tersebut maka pihak Kontraktor CV. Citra Hotama dikenakan denda keterlambatan sebesar 5% x Rp 43.443.359 = Rp 2.172.167,95 (Dua juta seratus tujuh puluh dua ribu seratus enam puluh tujuh rupiah sembilan puluh lima sen) telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 10 Juli 2017.

Semester I Tahun 2019

Pada tanggal 20 April 2019 Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat mengajukan penghapusan BMN kendaraan roda 2 sejumlah 1 unit, sampai saat pelaporan semester 1 Tahun 2019 baru keluar ijin prinsip dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dilanjutkan untuk proses ke KPKNL Singkawang.

Semester II Tahun 2019

Pada tanggal 31 Juli 2019 terdapat jurnal penyesuaian terhadap Peralatan dan mesin sebesar Rp. 5.900.000; yang merupakan Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin (Barang dengan nilai perolehan dibawah Rp 1.000.000; per satuannya)
Pada tanggal 14 Oktober 2019 diadakan lelang kendaraan dinas roda 2 tahap 1 sebanyak 1 unit melalui perantara KPKNL Singkawang tetapi tidak ada peminatnya.
Pada tanggal 7 November 2019 diadakan lelang tahap 2 berupa 1 unit kendaraan dinas roda 2 dan pada tanggal 14 November 2019 ada peminatnya dengan harga Rp1.590.000; (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Semester I Tahun 2020

Pada tanggal 29 April 2020 Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat mendapat Revisi Anggaran dari semula Rp12.661.704.000; menjadi Rp8.472.817.000; karena untuk membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Semester II Tahun 2020

Pada tanggal 30 Desember 2020 terdapat permasalahan di E-rekon yaitu terdapat selisih buku minus pada bangunan menara/bak penampungan/resevoir air minum (NUP 5, kode barang 5020605008) disebabkan nilai susut senilai Rp11.925.938,00; lebih besar dari nilai perolehan senilai Rp9.862.000,00; Kondisi tersebut telah dilakukan normalisasi namun dikoreksi kembali oleh Satker, sehingga disarankan untuk melakukan normalisasi kembali.

Semester I Tahun 2021

Nilai LRA pendapatan senilai Rp521.829.156,00; lebih besar dari LO pendapatan senilai Rp510.291.243,00; atau terdapat selisih Rp11.537.913,00; terdiri dari pengembalian belanja pegawai TAYL sebesar Rp12,00; pengembalian belanja

barang TAYL sebesar Rp11.537.900,00; pengembalian belanja modal TAYL sebesar Rp1,00; (Temuan BPK Tahun 2015 sebesar Rp2.172.167,95; namun tim BPK meminta dibulatkan sehingga yang disetor oleh Satker sebesar Rp2.172.168; atau selisih Rp0,05).

Aset tetap renovasi selisih Rp7.298.900,00; berupa partisi bangunan kantor utama dari transfer masuk dari Dit. PSDI tahun 2017 yang belum dikapitalisasi kedalam aset induk bangunan kantor dan aset tak berwujud lainnya senilai Rp2.628.212.000,00; berupa pekerjaan pencairan sumur artesis senilai Rp22.000.000,00; hasil pengadaan tahun 2003, pekerjaan masterplan untuk survey analitik lingkungan senilai Rp500.000.000,00; tahun 2004, dan pengerukan kolam pelabuhan senilai Rp2.106.212.000,00; hasil pengadaan tahun 2005. Kondisi tersebut Satker salah mengklasifikasi aset yang seharusnya dapat dikapitalisasi menjadi aset induk yang sudah ada saat pelaporan.

Semester II Tahun 2021

Sesuai Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor : ST-08.11.5/IJT/TU.420/XI/2021 tanggal 8 November 2021, Auditor Inspektorat II telah melaksanakan Probitas Audit Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pelabuhan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat TA. 2021, berdasarkan hasil Audit ditemukan hal – hal sebagai berikut :

1. Adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp8.220.559,25; dan sudah disetor sebesar Rp8.220.560; (bukti terlampir)
2. Adanya Tiang Pancang tidak terpasang pada Rehabilitasi Dermaga sebanyak 108 unit senilai Rp204.700.230;,, sudah dilakukan pencatatan kapitalisasi aset berupa tiang pancang yang tidak terpasang sebanyak 108 unit ke aset turap (Checdam/Penahan Sedimen)
3. Adanya Pencatatan kapitalisasi aset dermaga senilai Rp3.355.000.000;,, dalam Laporan Keuangan hanya dapat diakui senilai Rp3.149.299.770;,. Sudah dilakukan pencatatan kapitalisasi aset dermaga dalam Laporan Keuangan di Aplikasi SIMAKBMN sesuai pekerjaan terpasang senilai Rp3.149.299.770;.

Adanya selisih di E-rekon terkait setoran Temuan Hasil Audit ITJEN senilai Rp8.220.560; di Aplikasi SIMAKBMN mengurangi nilai aset sedangkan di Aplikasi SAIBA menambah nilai pagu.

Adanya Jurnal Penyesuaian terkait tagihan listrik bulan Desember 2021 sebesar Rp20.005.701;,, yang dibayarkan pada bulan Januari 2022 dan di Neraca menjadi Beban Yang Masih Harus di Bayar.

Adanya Jurnal Penyesuaian terkait jasa tambat labuh di kolam pelabuhan per 31 Desember 2021 yang akan ditagihkan pada bulan Januari 2022 dan di Neraca menjadi Pendapatan Yang Masih Harus di Terima (PYMHD).

Masing – masing jurnal di buat memo penyesuaian (bukti terlampir).

Semester I Tahun 2022

Pada semester I Tahun 2022 operator SAKTI modul aset mengreklas keluar dan mengreklas masuk peralatan dan mesin serta bangunan hanya penggantian Akun, dikarenakan salah penginputan di modul komitmen.

Menindaklanjuti surat Inspektur Jenderal Nomor R.104/ITJ.2/HP.410/V/2022. tanggal 25 Mei 2022 perihal Laporan Hasil Evaluasi PNBPN atas Jasa Tambat Labuh dan Pas Masuk Tahun Anggaran 2021 masih ada kekurangan pembayaran dikarenakan

kesalahan dalam perhitungan etmal sebesar Rp6.475.934; (enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah). Dan telah dilakukan penagihan kekurangan dimaksud dan telah menyetorkannya ke kas negara sebagaimana bukti penerimaan negara dan rincian kurang pungut terlampir (bentuk file pdf).

Semester II Tahun 2022

Pada bulan Desember 2022 Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat melakukan permintaan koreksi data SPM/SP2D dengan rincian sebagai berikut :

Nomor SPM : 00215A
Tanggal SPM : 15 Desember 2022

Yang telah diterbitkan SP2D

Nomor SP2D : 220931301008576
Tanggal SP2D : 19 Desember 2022

Koreksi dimaksud di atas dikarenakan hal – hal sebagai berikut :

1. Kesalahan penarikan data pada Akun kegiatan lain.
2. Terdapat pagu minus.
3. Terdapat sisa dana yang seharusnya sudah habis.
4. Data Komp. SubKomp dan Item pada Detail COA tidak lengkap.

Nomor SPM : 00217A
Tanggal SPM : 15 Desember 2022

Yang telah diterbitkan SP2D

Nomor SP2D : 220931301008581
Tanggal SP2D : 19 Desember 2022

Koreksi dimaksud di atas dikarenakan hal – hal sebagai berikut :

1. Kesalahan penarikan data pada Akun kegiatan lain.
2. Terdapat pagu minus.
3. Terdapat sisa dana yang seharusnya sudah habis.
4. Data Komp. SubKomp dan Item pada Detail COA tidak lengkap.

Semester I Tahun 2023

Pada bulan Januari 2023 PYMHD tahun 2022 sebesar Rp15.182.305; telah dibayar dan disetorkan oleh bendahara penerimaan, (daftar terlampir).

Pada tanggal 6 Januari 2023 operator GLP salah menjurnal balik yang mengakibatkan ada mutasi tambah Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima di Muka sebesar Rp577.944; dan sudah ditindak lanjuti dengan menjurnal balik kembali.

Pada bulan Februari 2023 Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat telah melelang gedung dan bangunan berupa rumah dinas dalam kondisi rusak berat, dan sudah selesai lelangnya tinggal menunggu SK penghapusan BMN nya dari Eselon I DJPT.

Adanya selisih persediaan sebesar Rp2.611.000; dikarenakan persediaan yang di GUP kan akhir bulan Juni dan SP2Dnya terbit bulan Juli 2023.

Hasil rekon persediaan pas masuk antara bendahara penerimaan dengan petugas pas masuk dari TKPU ada perbedaan dikarenakan setoran pas masuk tanggal 27, 28 dan 30 Juni 2023 bertepatan Cuti Bersama jadi disetor pada tanggal 3 Juli 2023.

Semester II atau Tahunan TA. 2023

Dapat kerugian pelepasan asset yang disebabkan oleh penjualan rumah dinas melalui proses lelang senilai Rp.488.098.299,-.

Pembelian aset ekstrakontabel berupa kamera CCTV outdoor, tripot kamera dan kursi senilai Rp.13.185.000,-

Perolehan Aset Lainnya berupa bangunan kios senilai Rp.130.000.000,-

KDP berupa perencanaan rumah dinas senilai Rp.50.000.000,-

Pada tanggal 6 Desember 2023 satker PPN Pemangkat melakukan koreksi data SPP/SPM (daftar terlampir)

Pada tanggal 29 Desember 2023 dilakukan jurnal balik atas Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka berada di Debet dan Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi beada di Kredit sebesar Rp.4.546.080,-.